

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam program Rastra dan BPNT di Sumatera Barat Bulog memiliki peran yang berbeda. Selain itu untuk pemerintah tingkat Kabupaten Kota yang mengelola masing-masing program berbeda, dimana program Rastra dikelola oleh bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota dengan bekerjasama dengan im koordinasi Rastra tingkat Kota dan Kecamatan dan juga TKSK yang ada di kecamatan. Sedangkan program BPNT dikelola oleh Dinas Sosial tingkat Kota melalui kerjasama dengan Himbara (BRI di Kota Padang) dan juga TKSK di Kecamatan.
2. Implementasi dari program Rastra dan BPNT di Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik dan memenuhi variabel implementasi kebijakan model Edward III, yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya untuk variabel komunikasi dan sumberdaya dalam program BPNT di Kota padang dianggap masih belum optimal karena tingkat persiapan yang belum matang sehingga terkendala dalam pelaksanaan penyaluran.
3. Perbandingan tingkat ketepatan pendistribusian Program Rastra dan BPNT menurut masyarakat miskin penerima manfaat berdasarkan survey menggunakan indicator 6T diketahui bahwa tingkat ketepatan sasaran dan tepat waktu Program Rastra lebih tinggi dibandingkan dengan BPNT, sedangkan untuk ketepatan jumlah dan tepat kualitas Program BPNT lebih tinggi dibandingkan Rastra, dan untuk ketepatan jumlah dan administrasi kedua program ini sudah mencapai 100%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Pusat sebagai pengambil kebijakan diharapkan mengkaji kembali konsep bantuan pangan terhadap masyarakat miskin baik itu Rastha dan BPNT, agar program yang dicanangkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin, bukan berdasarkan kemauan pengambil kebijakan agar manfaat dan tujuan program tercapai yaitu untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dalam kebutuhan pangan.
2. Pemerintah sebaiknya menjadikan Bulog sebagai satu-satunya penyedia barang dalam program BPNT sehingga peran Bulog tidak berkurang tetap menjaga stabilisasi harga, tidak mengurangi penyerapan bahan pangan dari petani dan lebih mudah dalam pengawasan penyaluran program.
3. Agar pendistribusian program berjalan sesuai SOP dan mencapai tujuan dengan indicator ketepatan 6T, para penyelenggara program harus lebih megoptimalkan kinerjanya dalam persiapan pelaksanaan program agar tidak hanya sebatas formalitas program berjalan tapi tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan juga melakukan pengawasan dan evaluasi agar segera dibenahi dan dijalankan berdasarkan pedoman yang ada.